

TESIS

**PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN
TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATPOL PP DITINJAU DARI
PERSPEKTIF NORMA HUKUM DI KABUPATEN PAMEKASAN
(STUDI KASUS PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA)**



Oleh

Novian Eri Kusuma
NIM 092014453014

**PROGRAM STUDI MAGISTER
SAINS HUKUM DAN PEMBANGUNAN
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022**

TESIS

**PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN
TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATPOL PP DITINJAU DARI
PERSPEKTIF NORMA HUKUM DI KABUPATEN PAMEKASAN
(STUDI KASUS PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA)**

Oleh

**Novian Eri Kusuma
NIM 092014453014**

**PROGRAM STUDI MAGISTER
SAINS HUKUM DAN PEMBANGUNAN
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022**

TESIS

**PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN
TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATPOL PP DITINJAU DARI
PERSPEKTIF NORMA HUKUM DI KABUPATEN PAMEKASAN
(STUDI KASUS PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA)**

Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Studi Sains Hukum dan Pembangunan
Pada Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga

Oleh

**Novian Eri Kusuma
NIM 092014453014**

**PROGRAM STUDI MAGISTER
SAINS HUKUM DAN PEMBANGUNAN
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022**

TESIS INI TELAH DISETUJUI
PADA TANGGAL 25 Juli 2022

Oleh:

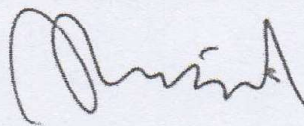
Pembimbing Ketua



Dr. Sri Winarsi, SH., MH., QGIA

NIP 19680603 199303 2 001

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Magister Imunologi



Dr. Radian Salman, S.H., LL.M

NIP 197710192003121001

Telah diuji pada

Tanggal: 23 Juli 2022

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua : 1. Dr. Sukardi, S.H., M.H.

Anggota : 2. Dr. Sri Winarsi, S.H., M.H., QGIA

3. Dr. Radian Salman, S.H., LL.M.

4. Dr. Suparto Wijoyo, S.H., M.Hum

5. Dr. Akmal Boedianto, S.H., M.Hum., M.Si.

Lembar Pernyataan Orisinalitas

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Novian Eri Kusuma
NIM : 092014453014
Program Studi : Magister Sains Hukum dan Pembangunan
Judul Tesis : PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DALAM
PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
SATPOL PP DITINJAU DARI PERSPEKTIF NORMA
HUKUM DI KABUPATEN PAMEKASAN (STUDI
KASUS PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tesis saya ini adalah asli (hasil karya sendiri) bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (Plagiarism) dari karya orang lain. Tests ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik.

Dalam tesis ini tidak terdapat pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan didalam daftar pustaka. Demikian, pernyataan ini dibuat tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, apabila pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku di Universitas Airlangga.

Surabaya, Juli 2022



Novian Eri Kusuma
NIM 092014453014

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur Kehadirat Allah SWT atas karunia yang telah dilimpahkan sehingga penulis dapat melaksanakan penelitian dan menyelesaikan tesis dengan judul **PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATPOL PP DITINJAU DARI PERSPEKTIF NORMA HUKUM DI KABUPATEN PAMEKASAN (STUDI KASUS PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA)**.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Airlangga, Prof. Dr. Mohammad Nasih, S.E., M.T., Ak., CMA atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan selama menjalani pendidikan di Universitas Airlangga.
2. Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Airlanggabeserta jajarannya atas kemudahan yang diberikan selama menjalani pendidikan.
3. Ketua Program Studi Magister Sains Hukum dan Pembangunan, Dr. Radian Salman, S.H., LL.M yang telah banyak memotivasi dan memberikan arahan serta dukungan selama menjalani pendidikan dan proses penelitian.
4. Dr. Sri Winarsi, dan Dr. Radian Salman selaku dosen pembimbing yang telah memotivasi, mendukung dan membimbing selama proses penelitian sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
5. Seluruh staf pengajar Program Studi Magister Sains Hukum dan Pembangunan Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga atas wawasan keilmuan selama menjalani pendidikan.
6. Seluruh staf Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga yang telah memberikan pelayanan akademik selama menjalani pendidikan.
7. Kedua orang tua penulis yang telah memberikan bantuan materiil dan doa, dorongan serta semangat

Surabaya, Juli 2022

Penulis

SUMMARY

Enforcement of Peraturan daerah in Implementation Of Main Duties and Functions of Satpol PP Reviewing from Legal Norms Perspective in Pamekasan Regency (Case Study of Controlling Street Vendors)

The participation of the community's role in the government system will create perfect synergy to create good governance that wants perfect cooperation and participation from the 3 main actors in the state, namely the government or government, private or private parties, and society or civil society. The synergy of these three elements is very important so that there is a process of making fair public policies and equitable national development. The Civil Service Police Unit is a regional apparatus tasked with assisting regional heads in the context of enforcing regional regulations and maintaining public order and public peace. In the Regulation of the Minister of Home Affairs it is also stated that the Civil Service Police Unit is an apparatus of the Regional Government in maintaining and implementing public peace and order as well as enforcing Regional Regulations, and in Article 1 paragraph (8) of Government Regulation Number 6 of 2010 it is also stated that the Civil Service Police Unit, hereinafter abbreviated as Satpol PP, is part of the Regional Apparatus in the enforcement of Regional Regulations and the implementation of public order and public peace.

Based on the results of the study and the author's findings related to the problems that occurred in several areas in the Regency regarding the existence of problems related to peace and order caused by the proliferation of street vendors at a number of points, it is necessary to take firm action from the Civil Service Police Unit. This is in line with the mandate contained in the Pamekasan Regency Regional Regulation Number 5 of 2018 concerning the Empowerment of Street Vendors.

In this paper, the author will try to examine several points that can be used as indicators of assessment of the main tasks and functions of the Civil Service Police

Unit, Pamekasan Regency, East Java. Among them are accountability, responsiveness, and effectiveness in enforcing local regulations related to the main tasks of the Satpol PP Pamekasan Regency. Based on the Pamekasan Regency Strategic Plan document for 2018-2023, the performance achievement of the Civil Service Police Unit has not been maximized at the level of resolving K3 violations (order, tranquility, aesthetics), this is because the service does not reach the target because the handling of disturbances to peace and public order is still high and the level of completion it is also not optimal, and the enforcement of regional regulations is also not optimal, although every regional regulation violation can be handled and resolved, these violations often repeat themselves and have not provided a deterrent effect to the community. This shows that the Civil Service Police Unit has not provided great benefits to the community. As for those who have not reached the target, it is influenced by several factors, including the lack of support from existing resources, both the resources of the Civil Service Police Unit apparatus as well as the budget and other supporting infrastructure.

RINGKASAN

PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATPOL PP DITINJAU DARI PERSPEKTIF NORMA HUKUM DI KABUPATEN PAMEKASAN (STUDI KASUS PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA)

Penyertaan peran masyarakat dalam sistem pemerintahan akan menimbulkan sinergisitas yang sempurna untuk menciptakan *good governance* yang menginginkan adanya kerjasama dan partisipasi sempurna dari 3 aktor utama di negara, yaitu pemerintah atau government, pihak swasta atau privat, dan masyarakat atau civil society. Sinergitas ketiga elemen ini sangat penting agar terjadi proses pembuatan kebijakan publik yang berkeadilan dan pembangunan nasional yang merata. Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat daerah yang bertugas membantu Kepala Daerah dalam rangka menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri juga disebutkan Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah dan di dalam Pasal 1 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 disebutkan juga bahwa Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah bagian Perangkat Daerah dalam penegakkan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Berdasarkan hasil telaah dan temuan penulis terkait permasalahan yang terjadi di beberapa wilayah di Kabupaten tentang adanya permasalahan yang menyangkut ketentraman dan ketertiban yang disebabkan oleh maraknya Pedagang Kaki Lima di sejumlah titik, maka perlu adanya tindakan tegas dari Satuan Polisi Pamong Praja. Hal tersebut sejalan dengan amanah yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Dalam tulisan ini, penulis akan mencoba mengkaji beberapa poin yang dapat dijadikan sebagai indikator penilaian terhadap tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Diantaranya adalah akuntabilitas, Responsivitas, dan Efektivitas dalam penegakan perkara terkait tupoksi Satpol PP Kabupaten Pamekasan. Berdasarkan dokumen Renstra Kabupaten Pamekasan tahun 2018-2023, pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja belum maksimal pada tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan), ini dikarenakan layanan tidak mencapai target sebab penanganan terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban umum masih tinggi dan tingkat penyelesaian juga belum optimal, serta penegakan peraturan daerah juga belum optimal walaupun setiap ada pelanggaran peraturan daerah dapat ditangani dan terselesaikan, pelanggaran tersebut sering kali terulang kembali dan belum memberikan efek jera kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan Satuan Polisi Pamong Praja belum memberikan manfaat yang besar ditengah masyarakat. Adapun berkenaan yang belum mencapai target dipengaruhi

oleh beberapa faktor juga antara lain minimnya dukungan sumber daya yang ada, baik sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja maupun anggaran dan sarana prasarana pendukung lainnya.

ABSTRACT

**ENFORCEMENT OF REGIONAL REGULATION IN IMPLEMENTATION
OF MAIN DUTIES AND FUNCTIONS OF SATPOL PP REVIEWING FROM
LEGAL NORMS PERSPECTIVE IN PAMEKASAN REGENCY (CASE
STUDY OF CONTROLLING STREET VENDORS)**

Referring to Article 1 point 1 of Presidential Regulation Number 125 of 2012 concerning Coordination of Arrangement and Empowerment of Street Vendors, the so-called Street Vendors (PKL) are business actors who carry out trading business using movable or immovable business facilities, using city infrastructure, facilities cities, public facilities, land and buildings owned by the government or private sector that are temporary/not permanent. Street vendors as part of the informal sector business have the potential to create and expand employment opportunities, especially for workers who lack adequate skills and expertise to work in the formal sector because of the low level of education they have, for that it is necessary to take actions or policies from the Regional Government so as not to cause problems in the community. In solving the problem of controlling street vendors, they require them to look at the problem from various aspects, and not only from one aspect. In this context, the Head of the Pamekasan Satpol PP which is an institution that carries out security and order in the community must continue to take corrective steps in all aspects of its activities, in order to improve the performance of its apparatus, considering that there will be more protests and complaints from both road users and residents. from the street vendors themselves who sell on the roadside. Based on the results of the research that the author did in the field, it turns out that the conditions for controlling street vendors are not firm, so it can be concluded that the ideal control of street vendors is difficult to realize because in reality there are still Satpol PP officers in Pamekasan Regency who control street vendors with compassion and not have the heart to deal with traders whose stalls/businesses must be forcibly dismantled when there is a security and border raid.

Keywords: Street Vendors, Satpol PP, Regional Regulations

ABSTRAK

**PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN TUGAS
POKOK DAN FUNGSI SATPOL PP DITINJAU DARI PERSPEKTIF NORMA
HUKUM DI KABUPATEN PAMEKASAN (STUDI KASUS PENERTIBAN
PEDAGANG KAKI LIMA)**

Melihat Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, yang disebut dengan Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah pelaku usaha yang melakukan usaha peraturan daerah dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas kota, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap PKL sebagai bagian dari usaha sektor informal memiliki potensi untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja, terutama bagi tenaga kerja yang kurang memiliki kemampuan dan keahlian yang memadai untuk bekerja di sektor formal karena rendahnya tingkat pendidikan yang mereka miliki, untuk itu perlu dilakukan tindakan atau kebijakan dari Pemerintah Daerah agar tidak menimbulkan persoalan di masyarakat. Dalam pemecahan masalah penertiban PKL mengharuskan mereka untuk melihat permasalahan dari berbagai aspek, dan bukan hanya dilihat dari satu aspek semata. Dalam konteks ini Kepala Satpol PP Kabupaten Pamekasan yang merupakan institusi yang melaksanakan keamanan dan ketertiban di masyarakat harus tetap melakukan langkah-langkah perbaikan dalam segala aspek kegiatannya, dalam rangka meningkatkan kinerja aparturnya, mengingat akan semakin banyak munculnya protes dan komplain baik dari warga masyarakat pengguna jalan maupun dari para PKL itu sendiri yang berjualan di pinggir jalan. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di lapangan, ternyata masih ditemukan kondisi penertiban PKL yang tidak tegas, sehingga dapat disimpulkan bahwa penertiban PKL yang ideal sulit untuk diwujudkan, karena pada kenyataannya masih terdapat petugas Satpol PP Kabupaten Pamekasan yang melakukan penertiban PKL dengan rasa iba dan tidak tega terhadap para pedagang yang lapak/usahanya harus dibongkar paksa ketika ada razia ketertiban dan keamanan.

Kata Kunci: Pedagang Kaki Lima, Satpol PP, Peraturan Daerah

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN	i
SAMPUL DALAM	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
PANITIA PENGUJI TESIS	iv
LEMBAR ORISINALITAS	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
SUMMARY	vii
RINGKASAN	ix
ABSTRACT	xii
ABSTRAK	xiii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1.1 Latar Belakang dan Rumusan Masalah.....	1
1.1.1 Latar Belakang.....	1
1.1.2 Rumusan Masalah.....	14
1.2 Tujuan Penelitian	14
1.3 Manfaat penelitian	14
1.4 Kerangka Konseptual.....	15
1.4.1 Teori Implementasi Kebijakan Publik	15
1.4.1.1 Konsep Implementasi.....	15
1.4.2 Satuan Polisi Pamong Praja / Satpol PP	20
1.4.2.1 Pengertian Satpol PP.....	20

1.4.2.2	Peran Satpol PP dalam Penegakan Peraturan daerah dan Perkada	25
1.4.2.3	Standar Operasional Prosedur Penegakan Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja	33
1.4.1	Ruang Lingkup Pedagang Kaki Lima	39
1.4.3.1	Konsep Pedagang Kaki Lima	39
1.4.4	Pengertian <i>Good Governance</i>	45
1.4.4.1	Ciri-Ciri <i>Good Governance</i>	46
1.4.4.2	Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i>	47
1.5	Metode Penelitian	51
1.5.1	Jenis Penelitian	51
1.5.2	Fokus Penelitian	51
1.5.3	Lokasi dan Waktu Penelitian	52
1.5.4	Sumber Data	52
1.5.5	Teknik Pengumpulan Data	53
1.5.6	Instrumen Penelitian	55
1.5.7	Metode Analisis	55
BAB II	ANALISIS IMPLEMENTASI PENEGAKAN PERATURAN DAERAH OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENCIPTAKAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT MELALUI PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA	60
2.1	Gambaran Umum Kabupaten Pamekasan	60
2.1.1	Kondisi Geografis Wilayah	59
2.1.2	Undang-Undang Pembentukan Daerah	69
2.1.3	Sumber Daya Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan	70

2.1.4	Kondisi Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan.....	71
2.1.5	Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Bidang Penegakan Peraturan Daerah	72
2.2	Implementasi Penegakan Peraturan Daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menciptakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat melalui Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Pamekasan.....	74
2.2.1	Akuntabilitas Satpol PP Kabupaten Pamekasan dalam Penegakan Perkada terkait Tupoksi	86
2.2.2	Responsivitas Satpol PP Kabupaten Pamekasan dalam Penegakan Perkada terkait Tupoksi	92
2.2.3	Efektivitas Satpol PP Kabupaten Pamekasan dalam Penegakan Perkada terkait Tupoksi	94
 BAB III HAMBATAN-HAMBATAN BAGI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TERHADAP PENGATURAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN PAMEKASAN, JAWA TIMUR.....		
3.1.	Hambatan-Hambatan bagi Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur.....	98
3.2.	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan.....	103
BAB IV PENUTUP		116
1.1	Kesimpulan	116
1.2	Saran	119
DAFTAR PUSTAKA		121

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Perbedaan Kegiatan Formal dan Informal	41
Tabel 1.2.	Perbedaan Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Peagang Asongan	45
Tabel 2.1.	Letak dan Luas Wilayah Kabupaten Pamekasan Menurut Kecamatan Tahun 2021	61
Tabel 2.2.	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Pamekasan Tahun 2021	63
Tabel 2.3.	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Pamekasan Tahun 2021	64
Tabel 2.4.	Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Pamekasan Tahun 2021	65
Tabel 2.5.	Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Pamekasan Tahun 2021	66
Tabel 2.6.	Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Pamekasan Tahun 2017 – 2021	67
Tabel 2.7.	Jumlah Pegawai negeri Sipil menurut tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Pamekasan Tahun 2021	68
Tabel 2.8.	Jumlah Pegawai negeri Sipil menurut tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Pamekasan Tahun 2021	69
Tabel 2.9.	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Polisi Pamong Praja terkait Penertiban Pedagang Kaki Lima.....	79
Tabel 2.10.	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Polisi Pamong Praja terkait Penertiban Pedagang Kaki Lima.....	81
Tabel 2.11.	Data Pedagang Kaki Lima (PKL) Kabupaten Pamekasan Tahun 2020	81

Tabel 3.1.	Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan pencapaian Visai dan Misi Kabupaten Pamekasan.....	107
------------	---	-----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta Letak dan Batas Kecamatan di Kabupaten Pamekasan	61
--	----